NAPAK REFORMASI

TRAGEDI MEI 1998



NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

mariberkaryakebenaran

Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah tragedi nasional yang sangat menyedihkan dan merupakan satu aib terhadap martabat dan kehormatan manusia, bangsa dan negara secara keseluruhan.
Pemerintah maupun masyarakat harus secara sungguh sungguh mengambil segala tindakan untuk mencegah terulangnya peristiwa semacam kerusuhan tersebut

(TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998)

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih i
Inisiatif Masyarakat Merawat Ingatan Publik tentang Tragedi Mei 1998 1
Kilas Balik Empat Belas Tahun Tragedi Mei 1998 2
Situs Tragedi 13-15 Mei 1998 5
Situs Pendukung 9
Karya Sastra Pengingat Mei 1998 ... 12
Daftar Bacaan ... 14
Lampiran: Peta Situs Tragedi Mei 1998

SEKAPUR SIRIH

PERINGATAN atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dialami korban adalah elemen penting bagi rasa adil korban dan bagi masa depan negara-bangsa itu sendiri. Peringatan itu merupakan pengakuan publik atas pengalaman korban serta penegasan tanggung jawab negara atas peristiwa itu. Ia menjadi media pernyataan komitmen bersama untuk memperbaiki akibat dari peristiwa tersebut dan untuk memastikan peristiwa serupa tidak berulang di masa depan. Bagi bangsa Indonesia, upaya yang sungguh-sungguh untuk mengingat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi sangat penting. Empat belas tahun era reformasi bergulir di Indonesia, pasca runtuhnya Orde Baru di pertengahan tahun 1998, belum lagi dapat menghadirkan rasa adil bagi korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Sementara itu, perjalanan sejarah negara-bangsa Indonesia justru menunjukkan betapa gampangnya peristiwa pelanggaran HAM berulang.

Di dalam situasi ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengagas **NAPAK REFORMASI**, sebuah proses merawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi melalui kunjungan pada situs-situs yang dapat menjadi jembatan ingatan pada peristiwa itu. Peristiwa yang diangkat adalah Tragedi Mei 1998, sebuah tragedi kemanusiaan yang menjadi jantung sejarah bergulirnya era reformasi di Indonesia. Pada pertengahan Mei 1998, kerusuhan yang menyasar pada komunitas Tionghoa melanda Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, ini adalah kesekian kalinya komunitas Tionghoa menjadi sasaran serangan kemarahan di dalam situasi kemerosotan ekonomi; tak satu pun kasus yang ditangani hingga tuntas. Namun, dalam Mei 1998, korban juga meliputi ratusan rakyat biasa yang ter/dibakar di dalam gedung-gedung yang menjadi sasaran serangan massa, maupun ribuan lainnya yang kehilangan mata pencaharian. Di tengah penjarahan, perusakan dan pembakaran gedung, puluhan perempuan menjadi korban perkosaan dan serangan seksual lainnya. Hal ini menimbulkan ketakutan yang mendalam di komunitas target kerusuhan, dan juga perempuan pada umumnya. Keprihatinan atas tragedi kemanusiaan ini menjadi semangat yang mempersatukan banyak warga untuk bahu-membahu memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat ini pula yang menjadi penguat desakan untuk mengakhiri Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang sekaligus menjadi penanda lahirnya Era Reformasi.

Namun, pengungkapan peristiwa Mei 1998 belum lagi membuahkan hasil. Meski telah ada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13–15 Mei 1998 (TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998), yang merupakan mekanisme independen *ad hoc* yang dibentuk oleh negara pada bulan Juli 1998, pengusutan atas mereka yang bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan ini terus tertunda. Ketiadaan perempuan korban yang bersedia memberikan kesaksian di hadapan publik dijadikan salah satu pembenar untuk memetieskan pengusutan kasus. Bahkan, kontroversi tentang ada tidaknya perkosaan juga seolah dibiarkan hidup di dalam masyarakat bersamaan dengan stigma penjarah bagi mereka yang di/terbakar di dalam kerusuhan itu. Di tengah kemandekan proses peradilan atas peristiwa ini, upaya untuk membangun pengakuan dan ingatan publik tentang tragedi Mei 1998 menjadi agenda yang luput dari perhatian pemerintah.

Mengamati situasi penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita perlu memikirkan bahwa pengakuan publik atas peristiwa pelanggaran HAM tidak selalu perlu menunggu proses peradilan. Proses peradilan membutuhkan waktu yang panjang, memfokuskan pada pertanggungjawaban individual dan memiliki keterbatasan-keterbatasan substantif dan struktural yang menghalangi korban memperoleh keadilan. Banyak pula situasi proses peradilan tak kunjung hadir akibat ketiadaan komitmen politik penyelenggara negara dan elit di negara tersebut. Situasi ini tidak hanya menyebabkan penuntasan kasus tertunda-tunda, tetapi juga pemulihan komunitas korban terkatung-katung. Situasi ini justru menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan yang berkepanjangan bahwa peristiwa serupa akan berulang di masa mendatang. Namun, perlu kita tegaskan bahwa proses pengakuan publik tanpa menunggu proses peradilan sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai pengganti proses peradilan itu sendiri. Artinya, pengakuan publik bukan pengganti proses peradilan, melainkan penegasan pada kebutuhan proses yang akuntabel untuk pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Terkait kasus perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan terus mengupayakan perbaikan sistemik agar proses peradilan yang dapat menghadirkan keadilan bagi perempuan korban. Proses ini mensyaratkan perbaikan perlindungan hukum tentang kekerasan seksual, kredibilitas sistem peradilan, sistem perlindungan saksi dan korban yang mumpuni, perbaikan sikap masyarakat untuk tidak menyalahkan dan menstigma perempuan korban kekerasan. Tanpa perbaikan tersebut, tuntutan untuk perempuan korban bersaksi adalah sebuah desakan yang tidak berperi-kemanusiaan dan tidak membantu korban sama sekali dalam proses pemulihannya. Di samping itu, tuntutan terus-menerus untuk

"korban perkosaan Mei 1998 bersaksi langsung agar publik bisa percaya" justru mengukuhkan budaya penyangkalan di dalam masyarakat mengingat bahwa adanya kasus perkosaan dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 telah diverifikasi oleh lembaga yang kredibel, yaitu TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Bahkan sesungguhnya, hak korban untuk memutuskan apakah ia mau bersaksi ataupun tidak adalah tak boleh digugat, sekalipun perbaikan-perbaikan yang kita upayakan telah dilakukan.

Dalam kerangka ini, upaya sungguh-sungguh mengingat peristiwa Tragedi Mei 1998 tanpa menunggu proses peradilan menjadi sangat penting. Ia menjadi simbol kesungguhan komitmen negara dan masyarakat untuk menghadirkan keadilan bagi korban. **NAPAK REFORMASI** menjadi cara yang dipilih Komnas Perempuan untuk memupuk komitmen tersebut. Sekaligus, **NAPAK REFORMASI** memberikan pengakuan dan penghargaan pada berbagai upaya merawat ingatan kolektif tentang pelanggaran HAM yang selama empat belas tahun terakhir oleh berbagai organisasi HAM, kelompok masyarakat maupun komunitas korban.

Dalam konsultasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan komunitas korban, komunitas pembela HAM dan kelompok masyarakat lainnya, terungkap kebutuhan untuk memastikan upaya merawat ingatan kolektif ini menjadi langkah yang sistematis. Ingatan kolektif yang memungkinkan publik berinteraksi dan menjadi agen aktif dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak korban dan tentunya, dalam memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Integrasi dalam kurikulum pendidikan sejarah nasional adalah salah satu langkah sistematis ini. Usulan ini telah disampaikan oleh Komnas Perempuan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam dua kali kesempatan yang terpisah, yaitu pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2011. Dalam kedua kesempatan itu, Presiden menyambut baik rekomendasi Komnas Perempuan dan menyampaikan dukungan untuk melaksanakannya.

Menindaklanjuti usulan ini pula, **NAPAK REFORMASI** dikembangkan oleh Komnas Perempuan sebagai sebuah usulan metodologi memperkenalkan peristiwa Mei 1998 kepada para siswa bagi pengajar sejarah, khususnya tingkat SLTA. Informasi-informasi yang dikumpulkan untuk **NAPAK REFORMASI** akan dikemas sebagai materi ajar yang siap pakai. Proses pengumpulan dan penyusunan narasi **NAPAK REFORMASI** melibatkan tidak hanya komunitas korban dan pihak yang selama ini melakukan advokasi kasus, melainkan juga guru-guru sejarah itu sendiri. Narasi ini kemudian akan didiskusikan dengan pihak Kementerian Pendidikan Nasional sebagai materi untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan sejarah nasional.

Komnas Perempuan menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Suma Mihardja yang bersedia berbagi informasi dan menjadi penutur dalam kegiatan ujicoba ini, kepada Perempuan Indonesia Tionghoa (PINTI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Jaringan Tionghoa Muda (JTM), Forum Komunikasi Keluarga Korban Mei 1998, Paguyuban Keluarga Korban Mei 1998, Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah di Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan berbagai pihak lainnya yang menyukseskan kegiatan ini. Juga kepada tim di dalam Komnas Perempuan yang menjadikan inisiatif ini berwujud, Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan dan Subkomisi Partisipasi Masyarakat yang mengawal gagasan **NAPAK REFORMASI,** dan seluruh keluarga besar Komnas Perempuan.

Jakarta, 13 Mei 2012
Komnas Perempuan

INISIATIF MASYARAKAT MERAWAT INGATAN PUBLIK TENTANG TRAGEDI MEI 1998

EMPAT belas tahun berlalu dari tragedi Mei 1998 namun hak atas kebenaran, keadilan serta pemulihan tidak kunjung dinikmati oleh korban. Bungkam, menjadi pilihan ketika seluruh landasan hukum tidak mengakomodir penegakan hak asasi manusia khususnya perempuan korban kekerasan. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat di tingkat Kejaksaan Agung. Hal ini bagi korban membuktikan bahwa negara tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM serta memberikan situasi kondusif bagi korban.

Di tengah kurangnya perhatian negara dalam mengupayakan situasi yang kondusif, masyarakat sipil terus membuka diri untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat turut memperjuangkan hak-hak korban. Hal ini tampak dari inisiatif-inisiatif yang tetap hidup untuk merawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi telah terjadi. Beberapa contoh inisiatif yang dapat kita lihat adalah:



Boneka yang terbuat dari kain putih berukuran 10-12 cm yang dijahit oleh komunitas korban, khususnya para ibu yang anaknya hilang dan ter/dibakar di dalam kerusuhan Mei 1998, disebut **Boneka Mei**. Melalui boneka ini para korban memulihkan beban mental yang dialami. Proses menjahit boneka diartikan sebagai proses menjahit luka demi kesembuhan. Sampai saat ini boneka Mei ini diproduksi oleh salah satu lembaga pendamping yang didistribusi ke seluruh keluarga korban untuk diberi hiasan dengan macam-macam warna. Boneka yang sudah dihiasi dengan macam-macam pernik biasanya dijual untuk penggalangan dana bagi keluarga korban.



Selendang Persahabatan merupakan gagasan Perempuan Indonesia Tionghoa (PINTI) yang didesain oleh Hartati Adiarsa. Selendang persahabatan bercorak batik dengan ragam hias dan simbol-simbol yang menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh perpaduan budaya yang harmonis antara India, Cina, Arab/Persia, Eropa dan Jepang. Pesan yang ingin disampaikan oleh corak selendang adalah kasih, persaudaraan

dan perdamaian antara sesama manusia sehingga tidak ada lagi kekerasan bagi siapan pun khususnya perempuan. Di berbagai kesempatan, Komnas Perempuan menjadikan selendang persahabatan sebagai lambang solidaritas antar komunitas korban dan perempuan pembela HAM.

Komunitas korban juga menghidupkan ingatan akan peristiwa Mei 1998 dengan membangun sebuah prasasti yang dinamakan **Prasasti Jarum Mei.** Prasasti ini terletak di kampung kenangan mei kelurahan Jatinegarakaum, Klender Jakarta Timur. Pilihan lokasi Kampung Mei semata-mata karena banyak korban berasal dari kampung ini terbakar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan itu pada kerusuhan Mei 1998. Makna yang tersirat pada prasasti Jarum Mei melambangkan tekad untuk menjahit dan menyembuhkan luka keluarga korban.

Keputusan Komisi III DPR periode 1999-2004 bahwa penembakan mahasiswa Trisakti bukan pelanggaran HAM berat tidak menurunkan semangat masyarakat sipil untuk melakukan inisiatif agar pelanggaran HAM segera dituntaskan. Salah satunya dengan melakukan **Aksi Kamisan** dengan berdiri dan diam, sesekali membacakan tuntutan atau puisi di depan istana presiden. Saat tulisan ini disusun, sudah 290 aksi kamisan yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Mereka memilih warna hitam dalam setiap aksi yang digelar, hitam merupakan simbol keteguhan dan semangat perjuangan melawan ketidakadilan.

Cara lain memperkenalkan isu-isu Mei 1998 adalah lewat **karya sastra** dengan tema Mei 1998. Sastra menjadi pilihan dalam mengenalkan sejarah kelam serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Selain karya sastra, **karya-karya visual** dalam bentuk film dokumenter kerap menjadi pendekatan untuk memperkenalkan isu Mei 1998.

KILAS BALIK EMPAT BELAS TAHUN TRAGEDI MEI 1998

MESKI sudah empat belas tahun yang lalu, namun masih segar dalam ingatan tentang peristiwa Tragedi Mei 1998. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-15 Mei 1998 (TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998), fakta menunjukkan setidaknya ada 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mayoritas adalah dari etnis Tionghoa; 52 perkosaan *gang rape*, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penganiayaan serta 9 pelecehan seksual. Yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual berdasarkan Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang. TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dibentuk atas perintah Presiden BJ Habibie dan berdasarkan Keputusan Bersama pada tanggal 23 Juli 1998 oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung. Tim independen ini dipimpim oleh Marzuki Darusman (Komnas HAM), TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 beranggotakan perwakilan dari sejumlah unsur eksekutif dan yudikatif serta dari masyarakat sipil.

Kerusuhan Mei 1998 tidak hanya terjadi di Jakarta melainkan beberapa di kota lainnya seperti Solo, Medan, Surabaya, serta Palembang. TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 menyebutkan bahwa dinamika sosial politik yang terjadi pada tanggal 13 -15 Mei 1998 yang ditandai dengan adanya kerusuhan di Jakarta serta beberapa kota lainnya merupakan akumulasi dari rangkaian tindakan kekerasan yang terjadi sebelumnya seperti Pemilu 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR-RI 1998, unjuk rasa mahasiswa yang terjadi terus menerus, serta tertembaknya dan tewasnya mahasiswa Universitas Trisakti. Pola-pola kerusuhan yang terjadi di beberapa kota mempunyai kemiripan pola dan sangat bervariasi, mulai dari bersifat spontan, lokal sporadis, sampai yang terencana dan terorganisir.

Pola umum kerusuhan terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan yang meliputi aktivitas memancing reaksi dengan cara membakar material tertentu (ban, kayu, tong sampah, serta barang bekas), membuat perkelahian antar kelompok/pelajar, meneriakkan yel-yel tertentu untuk memanasi massa/menimbulkan rasa kebencian seperti: "mahasiswa pengecut", "polisi anjing"; (2) tahap perusakan seperti melempar botol, batu, mendobrak pintu toko-toko/rumah, memecahkan kaca, membongkar sarana umum dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan; (3) tahap penjarahan yaitu dengan mengambil seluruh benda-benda dalam gedung yang telah dirusak; (4) tahap pembakaran yang merupakan puncak kerusuhan yang paling banyak memberikan kontribusi kerugian yang paling besar serta memakan banyak korban.

Pelakunya pun beragam, mulai dari massa yang pasif berubah menjadi massa yang aktif, provokator, bahkan ditemukan anggota aparat keamanan. Pada umumnya pelaku melakukan tindak perusakan, penjarahan, pembunuhan, penculikan, perkosaan dan intimidasi yang mengarah menjadi teror. Pelaku pasif semula hanya berkumpul untuk melihat dan sekedar ingin tahu apa yang sedang tejadi, lalu ikut-ikutan terlibat dalam perusakan dan penjarahan. Sebagian dari kelompok ini menjadi korban kebakaran. Pelaku aktif merupakan massa dengan jumlah banyak melakukan perusakan, pembakaran serta penjarahan toko-toko dan rumah secara terorganisir. Pelaku yang tidak kalah penting bahkan menjadi aktor dalam kerusuhan adalah kelompok Provokator yang memancing massa untuk melakukan

keributan, melakukan perusakan, pembakaran dan mengarahkan massa untuk melakukan penjarahan. Kelompok ini bukan merupakan penduduk setempat dan terdiri dari belasan orang, memiliki keterampilan menggunakan alat kekerasan, menggunakan sepeda motor, mobil/jeep serta menggunakan alat komunikasi seperti HT dan HP. Kelompok ini melengkapi dirinya dengan batu, bom molotov, cairan pembakar serta linggis.

Banyaknya korban pada kerusuhan tersebut cukup banyak, baik itu menderita secara fisik, psikis serta kerugian material akibat rumah dan toko yang dibakar serta harta yang dijarah, meninggal dunia akibat terbakar, tertembak, teraniaya serta kehilangan pekerjaan. Belum lagi bagi korban miskin kota yang meninggal dalam mall yang dibakar kerap mendapat stigma "penjarah". Dalam banyak kesempatan keluarga korban yang terbakar dalam mall berharap untuk tidak menempelkan stigma "penjarah" pada keluarga mereka yang meninggal dalam pusat-pusat perbelanjaan itu.

Etnis Tionghoa menjadi target di dalam kerusuhan ini; hal ini juga terlihat dari fakta bahwa sejumlah besar korban perkosaan adalah perempuan etnis Tionghoa. Kelompok etnis ini memang sering menjadi kambing hitam dalam situasi krisis ekonomi di Indonesia. Kelompok etnis Tionghoa sebelum tahun 1998 secara khusus mengalami diskriminasi yang dikukuhkan lewat kebijakan negara, antara lain sebagai satu-satunya kelompok etnis yang diwajibkan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan untuk dapat menikmati layanan publik dan tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol etniknya di dalam masyarakat, seperti bahasa dan agama/keyakinan. Sentimen ras yang ada di dalam masyarakat menjadikan kalangan Tionghoa sebagai sasaran tembak dari masyarakat yang tidak puas dan sekaligus sasaran pengalih yang cukup efektif untuk mengaburkan kekeliruan yang dibuat oleh pejabat-pejabat negara di tengah krisis ekonomi yang menghantam Indonesia sejak tengah tahun 1997.

Pada tragedi ini, TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka. diperkirakan 300 – 1.200 orang meninggal dunia. Di Jakarta saja, data Polisi Daerah menunjukkan 451 meninggal, dan tidak tercatat korban luka. Data Kodam 463 meninggal dunia dan 69 orang luka-luka. Data Pemda DKI 288 meninggal dunia dan 101 luka-luka. Data dari masyarakat sipil, yaitu Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) ada 1.190 meninggal akibat ter/dibakar, 27 akibat senjata/dan lainnya, dan 91 luka-luka. Berbeda dari persoalan kekerasan seksual, angka yang berbeda untuk korban meninggal dan luka-luka tidak dijadikan alasan untuk menyangkal adanya korban.

Padahal, kesimpangsiuran data tentang kekerasan seksual kerap disebabkan oleh hukum positif Indonesia yang mensyaratkan adanya laporan korban perkosaan yang menunjukkan tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kekerasan, serta adanya petunjuk bahwa ada terjadi perkosaan serta saksi-

saksi yang melihat peristiwa perkosaan. Dalam hal perbedaan angka jumlah korban, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan Rhadika Coomarawamy, dalam Misi ke Indonesia dan Timor Timur mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk harus meninggalkan 'budaya pengingkaran' atas peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 dan pada peristiwa lainnya pelanggaran HAM sebelum kerusuhan itu. Pelapor Khusus menegaskan ketiadaan laporan atas kasus perkosaan dikarenakan adanya ancaman terhadap keselamatan korban, ketidakpercayaan pada sistem peradilan kriminal yang tidak bisa membawa pelaku ke pengadilan serta kekuatiran pengungkapan kasus korban menyebabkan mereka diasingkan oleh masyarakat karena perkosaan membawa aib, hal ini diperoleh dari perbincangan Pelapor Khusus dengan para korban.

Penyangkalan atas kekerasan seksual ini yang hingga hari ini yang dijadikan alasan untuk menghambat tindak lanjut penyelidikan dari temuan TGPF. Namun, penting untuk dicatat bahwa meski peristiwa kekerasan seksual dalam Mei 1998 masih disangkal, pengungkapan tindakan ini telah menguatkan perempuan korban kekerasan di berbagai wilayah konflik seperti Papua, Aceh dan Timor Timur (sekarang Timor Leste) untuk mengungkapkan pengalamannya. Pengungkapan ini pula yang menjadi berbagai upaya untuk penanganan korban, termasuk pendirian lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, meski tidak khusus menangani korban kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998. Tragedi Mei 1998 menumbuhkan benih-benih solidaritas dari berbagai unsur masyarakat menembus perbedaan agama, gender, suku serta kelas sosial. Hingga hari ini, meski negara belum memberikan pengakuan dalam mengatasi kontroversi tentang terjadinya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998, semangat masyarakat untuk tetap mengingat tragedi kejahatan manusia yang terjadi pada Mei 1998 tidak pernah lekang.

SITUS TRAGEDI 13-15 MEI 1998

KRISIS ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia sejak tengah tahun 1997 menjadi momentum kebangkitan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Dari berbagai kampus, mahasiswa pun melakukan aksi besar-besaran ke gedung DPR/MPR untuk menuntut Soeharto turun dari pucuk pimpinan. Salah satunya dari kampus Trisakti. Namun aksi damai pada tanggal 12 Mei 1998 bubar dengan tembakan ke dalam kampus yang menewaskan empat orang mahasiswa. Esok harinya, dalam suasana berkabung, kerusuhan terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya, yang

ditandai dengan pembakaran dan penjarahan serta kekerasan berupa intimidasi dan kekerasan seksual termasuk perkosaan. Untuk mengingat peristiwa Tragedi Mei 1998, kami memilih sejumlah situs mewakili ingatan kita tentang peristiwa itu.

1. Universitas Trisakti



Universitas Trisakti membangun monumen setinggi 6 meter yang disebut **Monumen Trisakti 12 Mei 1998** (gambar 1 & 2) untuk mengenang 4 orang mahasiswa yang tertembak dalam aksi damai di dalam kampus dan merawat semangat aktivisme civitas akademika dalam memperjuangkan perbaikan bangsa. Tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 057/TK/2005 memberikan Bintang Jasa Pratama kepada 4 orang mahasiswa tersebut dengan gelar Pejuang Reformasi. Bentuk monumen yang menjulang tinggi mengungkapkan rasa kecewa, dan marah akibat kasus yang tak kunjung tuntas. Di sekitar monumen ada lambang yang menunjukkan empat mahasiswa yang tertembak.

Selain monumen pihak universitas juga membangun **museum** (gambar 4) yang memuat foto-foto aksi mahasiswa, peluru yang mengakibatkan para mahasiswa meninggal, gas air mata serta beberapa barang pribadi korban, dan di setiap titik terjadinya penembakan dibuat lingkaran logam menempel di aspal, sebagai penanda robohnya tubuh para mahasiswa (gambar 3). Lingkaran logam itu dirancang sebagai penanda bagian bawah peluru. Biasanya di dekat lingkaran logam diberikan rangkaian bunga duka cita dan selalu diganti setiap hari. Museum ini dibuka untuk umum setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 09.00 sampai dengan 17.00 Wib. Museum serta monumen terletak di:
Kampus A Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta 11440
Telepon: (+6221) 5663232 ext. 8128, 8140, Fax: (+6221) 5671356
Website: www.trisakti.ac.id

2. Pusat Perbelanjaan dan rumah sakit

Pada kerusuhan 13-15 Mei 2012, **kompleks pertokoan Glodok** (gambar 1 & 2) yang berada di *Jakarta Barat* menjadi salah satu sasaran. Toko-toko yang ada di sekitar pertokoan Glodok dirusak, dijarah, dan dibakar. Tempat lain yang juga mengalami hal yang serupa adalah **Plaza Yogya Klender**

(sekarang Mall Citra Klender) (gambar 3) yang terletak di Klender Jakarta Timur. Banyak anak-anak ter/dijebak dan ter/dibakar di dalam plaza tersebut. Semua korban yang ditemukan pada Tragedi 13-15 Mei 1998 dilarikan ke **Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo** (gambar 4), yang terletak di *Jalan Salemba, Jakarta Pusat*. Rumah Sakit menjadi tempat dalam memberikan pertolongan pertama bagi korban kerusuhan, tempat untuk mengidentifikasi korban serta mengotopsi korban perkosaan.



3. Prasasti dan artefak kenangan

Peristiwa Tragedi Mei 1998 meninggalkan duka yang mendalam bagi korban, keluarga korban, juga masyarakat. Sebagai upaya merawat semangat juang mengungkap peristiwa Tragedi Mei 1998, komunitas korban dan pendamping korban Mei 1998 membangun **Prasasti Jarum Mei** (gambar 1). Prasasti yang diresmikan pada Mei 2009 ini terletak di pinggir kali *RW 08/ RT 02 Kelurahan Jatinegarakaum Pulo Gadung*. Prasasti ini melambangkan tekad dan harapan untuk menjahit dan menyembuhkan luka-luka bangsa. Prasasti Jarum Mei didesain dan disumbangkan oleh seorang budayawan, Eka Budianta.



Inisiatif lain untuk mengenang luka ini di tampilkan dalam **kumpulan sketsa-sketsa wajah korban** (gambar 3) yang terbakar di *plaza Yogya, Klender*. Seorang ibu dari salah korban yang terbakar di dalam plaza Yogya menyimpan sketsa – sketsa itu di rumahnya (gambar 4) serta memperkenalkan sketsa-sketsa korban kepada setiap orang yang ingin mengetahui tentang korban yang terbakar di plaza Yogya Klender.

4. Makam kuburan massal

Kenangan lain akan Tragedi Mei 1998 adalah kuburan massal Korban Tragedi Mei 1998 yang terletak di **Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon Jakarta Timur** (gambar 2). Di sini terdapat 213 makam, yang letaknya di Blad 27, Blok AAI. Selain di Pondok Ranggon, korban kerusuhan Mei 1998 juga dimakamkan di 8 titik, yaitu TPU Pondok Ranggon Jakarta Timur, TPU Penggilingan Pondok Kopi Jakarta Timur, TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur, TPU Kampung Jati Klender Jakarta Timur, TPU Kampung Sumur Jakarta Timur, TPU Cipinang Muara I Jakarta Timur, Makam Keluarga Cipinang Muara II Jakarta Timur, Makam Keluarga Pengarengan Jakarta Timur.

5. Lembaga



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga negara yang independen dibentuk melalui Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 pada tanggal 18 Oktober 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil yang berakar pada tragedi kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Pada saat itu kelompok perempuan menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab Negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan terletak *di Jalan Latuharhari No.4B, Menteng Jakarta Pusat 10310, Telepon: (+6221) 3903963 , Fax: (+6221) 3903922, Email: mail@komnasperempuan.or.id, Website: www.komnasperempuan.or.id*



Komunitas Jurnalis yang menamai dirinya **Institut Studi Arus Informasi (ISAI)** mengabadikan peristiwa Mei 1998 dengan menamai salah satu gedungnya dengan nama "13-14 Mei 1998". Bagi ISAI, peristiwa itu pula yang menandai titik balik pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan pers serta kebebasan informasi yang dilakukan sepanjang Orde Baru. Dalam upaya merawat hak-hak tersebut, komunitas ISAI mengembangkan media alternatif untuk pendidikan publik dan juga melalui diskusi-diskusi. **Gedung 13-14 Mei 1998** terletak di *Jalan Utan Kayu No.68H Jakarta 13120, Telepon: (+6221) 85905319*

6. Situs Tambahan



Di samping persoalan ras, penting juga memaknai Tragedi Mei 1998 sebagai titik balik kebangkitan masyarakat sipil dalam menyuarakan pendapatnya, termasuk kritik terhadap pemerintah dan penyelengara negara. **Gedung DPR / MPR RI** (gambar 2) yang terletak *di Jalan Jend. Gatot Soebroto Jakarta Pusat*, **Bundaran Hotel Indonesia** (gambar 1) yang terletak di depan Hotel Indonesia *Jalan MH. Thamrin No.1 Jakarta 10310*, serta **Istana Negara** (gambar 3) yang terletak di *Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta,* merupakan tempat para mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan aksi serta menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan agar memberikan keadilan bagi pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia dan tidak lagi terjadi di masa yang akan datang.

Situs Pendukung

Pembahasan tentang Kerusuhan Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari persoalan sentimen ras yang sejak lama berkembang di Indonesia. Dalam situasi sentimen etnis, kerap kita dibuat lupa bahwa perjalanan sejarah Indonesia adalah berangkat dari kontribusi masyarakat Indonesia dari berbagai suku, agama, serta ras yang ada, termasuk Etnis Tionghoa.

Di Jakarta misalnya, hampir empat abad sebelumnya, berdasarkan data kependudukan 1673, jumlah penduduk di dalam kota Batavia adalah 27.086 orang. Mereka terbagi atas 2740 orang Belanda dan Indo, 5362 orang Mardiker, 2747 orang Tionghoa, 1339 orang Jawa dan Moor (India), 981 orang Bali dan 611 orang Melayu. Selebihnya 13.278 orang, adalah budak dari berbagai suku dan bangsa. Dalam perkembangannya di abad ke-19, komposisinya berubah menjadi kurang lebih 20% orang Belanda dan sederajat Eropa (termasuk Jepang), 30% orang Tionghoa, 10% orang Timur Asing lainnya (India, Arab), 30% orang Jawa, Sunda, Melayu (yang kelak menjadi cikal bakal orang Betawi) dan 10 persen suku lainnya (khususnya dari bagian Timur Nusantara seperti Ambon, Sumba dan Sulawesi).[1]

Bukti lain yang memperlihatkan kontribusi etnis Tionghoa adalah adanya warisan-warisan etnis Tionghoa dalam pembangunan kota Jakarta, yang diwakili oleh tiga situs yang dapat dikunjungi masyarakat, yaitu Gedung

[1] Suma Mihardja, "Tionghoa di Batavia", 2009

Galangan VOC, makam Souw Beng Kong serta Taman Budaya Tionghoa Taman Mini Indonesia Indah.



Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah Sejak reformasi tahun 1998, keberadaan masyarakat Tionghoa mulai diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2004, Yayasan Harapan Kita selaku pengelola Taman Mini Indonesia Indah mengalokasikan lahan seluas 4,5 hektar untuk membangun suatu wahana Tionghoa, yang kemudian dinamakan Taman Budaya Tionghoa.



Galangan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) terletak di *Jalan Kakap No.1 Penjaringan, Jakarta Utara.* Gedung yang berdiri pada tahun 1628 semula berfungsi sebagai kantor Gedung Galangan VOC. Luas Galangan VOC sendiri lebih dari 2000 meter persegi. Di sekitar galangan VOC menjadi pusat perdagangan utama di Asia karena seluruh kapal baik kecil maupun besar melakukan bongkar muat di galangan ini. Pada tahun 1980 – 1990 gedung ini digunakan sebagai gudang gula, bengkel besi dan kayu, gudang bahan kimia. Pada tahun 1997, PT. Sunda Kelapa Lestari (Ibu Susilawati) yang mempunyai inisiatif untuk melestarikan gedung bersejarah membeli dan merenovasi gedung ini tanpa mengubah struktur bangunan. Insiatif ini menghantarkan gedung VOC menjadi Pusat Kebudayaan Tionghoa. Dalam gedung VOC terdapat restoran Very Old Cafe (VOC), galeri seni, sekolah musik Hong Hua sebagai tempat belajar musik tradisional Cina serta sanggar tari Wallet Mas sebagai tempat belajar menari.



Makam Souw Beng Kong (1580-1644), Kapiten I yang dipilih Gubernur Jenderal Belanda JP Coen untuk menjaga ketertiban saat Belanda. Souw Beng Kong pindah dari Banten ke Batavia pada tahun 1619. Kapiten inilah yang bertanggung jawab mengurusi penduduk Tionghoa

beserta adat istiadat Tionghoa, dan bertindak sebagai juru bicara komunitas Tionghoa. Kapiten Souw Beng Kong juga harus memastikan pembangunan di Batavia berjalan dengan baik. Selain itu Kapiten ini memiliki perkebunan lada dan yang mengenalkan sistem irigasi yang sekarang digalakkan oleh petani – petani di Nusantara. Pembuatan dengan tehnik Subak atau terasering merupakan jasa Kapiten Souw Beng Kong. Makam Souw Beng Kong dikelola oleh Yayasan Souw Beng Kong. Makam ini di atas tanah seluas 200 meter^2 yang terletak di pemukiman di *Gang Taruna di Jalan Pangeran Jayakarta.*

Pada masa orde baru muncul berbagai kebijakan diskriminasi berbasis ras dan etnis Tionghoa. Beberapa kebijakan diskriminasi tersebut adalah:

- Penetapan Pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama No.2/OEM-1946 yang pada pasal 4 ditetapkan empat hari raya Tionghoa, yaitu tahun baru Imlek, wafatnya Khonghucu (tanggal 18 bulan 2 Imlek), Cheng Beng (Qingming) dan hari lahir Khonghucu (tanggal 27 bulan 8 Imlek) yang ditetapkan tahun 1946 oleh Presiden Soekarno, dicabut seluruhnya
- Instruksi Presidium Kabinet No.31/U/IN/1966 tentang Catatan Sipil (soal pemberian status golongan yang permanen bagi orang Tionghoa)
- Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/ Kep/12/1966 yang memuat masalah ganti nama (dalam praktek menjadi semacam paksaan halus bilamana ingin diakui sebagai WNI)
- Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Tjina yang diwujudkan dalam bentuk Badan Koordinasi Masalah Tjina (BKMT)
- Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967 yang mengatur tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina di sekolah nasional adalah sebanyak 40 persen dan dalam setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina (yang menimbulkan masalah kewarganegaraan mereka yang sebenarnya WNI berdasarkan aturan lama dan tiba-tiba menjadi WNA berdasarkan aturan kewarganegaraan yang baru)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No.455.2-360/1968 tentang penataan kelenteng-kelenteng di Indonesia (yang dalam praktek memaksakan kelenteng menjadi Vihara Buddhis)
- Surat Edaran Mendagri No.477/1978 yang menolak pencatatan perkawinan bagi yang beragama Khonghucu dan penolakan pencantuman Khonghucu dalam kolom agama di KTP
- Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/ iklan beraksara dan berbahasa Cina

- Keputusan Menteri Kehakiman No.02-HL.04/10/1992 tentang Pembuktian Status WNRI Anak-anak dari WNRI Keturunan Asing Pemegang Bukti WNRI
- Keppres No. 56 Tahun 1996 dan Inpres No. 4 Tahun 1999 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Pasca kerusuhan Mei 1998, berbagai perbaikan kebijakan untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi berbasis ras dan etnis telah diupayakan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

- Instruksi Presiden No.26 Tahun 1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
- Keputusan Presiden No.6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No.14 Tahun 1976 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina
- Keputusan Menteri Agama No.13 Tahun 2001 tentang Hari Libur Fakultatif Imlek Tahun 2001
- Keputusan Presiden No.19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KARYA SASTRA PENGINGAT MEI 1998

Beberapa cerita fiksi dapat menjadi rujukan untuk mengetahui peristiwa Mei 1998,seperti:

- *Remy Sylado, 9 Oktober 1740: Drama Sejarah, Jakarta: Kelompok KPG, 2005*
- *Satmoko Budi Santoso, Liem Hwa, Jogjakarta,: Gita Nagari, 2005*
- *Tan Danawidjaja, Coincidentia, Jakarta: Grasindo, cetakan II: Oktober 2005*
- *Dina F. Al Mansyur, Bapakku Arab, Ibuku Cina, Aku...Sebuah Novel untuk Bercermin, Jakarta: Interntional Network Publishing, 2007*
- *Muhammad Saidi, Lauw Pia Ngo (Kisah Pershabatan Muslim dan Kong Hu Cu), Jogjakarta: Pustaka Insan Madani, 2007*
- *Setiawan G. Sasongko, Along 'n Skateboard: Teror di Kapal Cheng Ho, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007*
- *Henry Simamora, Panggil Aku, Jo (Seks, Tubuh, Selingkuh), Jakarta: Star Gate Publisher, 2007*
- *Lalu Mohammad Zaenudin, Bunda. Aku Kembali, Jakarta: Republikasi, 2008*
- *Nisa'ul Kamilah, Andromeda: Repihan Kisah di Balik Suksesi Kepemimpinan Nasional, Jogjakarta: garasi, 2008*
- *Ratna Indraswari Ibrahim, Pecinan Kota Malang, Malang: Human Publishing, 2008*
- *Vanny Chrisma W, Wo Ai Ni Allah: Sebuah Novel Pencarian Spriritual Gadis Cina, Jogjakarta: Diva Press, 2008*

- *Yogi Soegyono, Mimpi Dara (Dara's Dream), Jakarta: hdtikar, 2008*
- *Ian Sanchin, Yin Galema, Jakarta: Hikmah, 2009*
- *Bachtiar Ginting, Cinta Bersemi di Seberang Tembok, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan X, 2004*
- *S. Satya Dharma, Lie, Jangan Bilang Aku Cina, Jakarta: Titik Terang, 2000*
- *K. Usman, Mei Hwa Wanita di Seberang Sana, Jakarta: Lini Zikrul Remaja, 2008*
- *Ali Muakhir, Catatan Harian Olin 1: Pilihan Terakhir, Bandung:Mizan, cetakan VII, 2002*
- *Ali Muakhir, Catatan Harian Olin 2: Aduh Pusiing!, Bandung: Mizan, cetakan VII, 2002*
- *Remy Sylado, Ca Bau Kan, Jakarta:Kelompok KPG, cetakan VIII, 2002*
- *Seno Gumira Ajidarma, CLARA atawa Wanita yang Diperkosa, Jogjakarta: Galang Press, cetakan II, 2001*
- *Veven Sp.Wardana, Panggil Aku: Pheng Hwa, Jakarta: KPG, 2002*
- *Remy Sylado, Siau Ling, Jakarta: Kelompok KPG, 2001*
- *Lan Fang, Reinkarnasi, Jakarta: Gramedia, 2004*
- *V Lestari, Pai Yin, Jakarta: Gramedia, 2000*
- *Meiliana K Tansri, Kupu-kupu, Jakarta: Gramedia, 2002*
- *Marga T, Gema Sebuah Hati, 2002*
- *S. Mara Gd, Air Mata Saudaraku, Jakarta: Gramedia 2004*
- *Leny Helena, Galang Giok Naga, Bandung: Qanita, 2006*
- *Clara Ng, Dimsum Terakhir, Jakarta: Gramedia 2006*
- *Marga T, Sekuntum Nozomi Jilid 3, Jakarta, 2006*
- *Sara Tee, Margaku Lauw, Jogjakarta: Pustaka Anggrek, 2007*
- *Sindhunata, Putri Cina, Jakarta: Gramedia, 2007*
- *Ali Muakhir, Catatan Harian Olin 3: Selalu di Hati, Bandung: Mizan, cetakan VII, 2003*
- *Ali Muakhir, Catatan Harian Olin 4: Kekasih Sepengalah, Bandung: Mizan, 2003*
- *Ali Muakhir, Catatan Harian Olin : Berdebar-debar, Bandung: Mizan, 2006*
- *Seno Gumira Ajidarma, Jakarta 2039: 40 Tahun 9 bulan setelah 13-14 Mei 1998, Jogjakarta: Galang Press, 2001*
- *Naning Pranoto, Miss Lu: Putri Cina yang Terjebak Konflik Etnik dan Politik, Jakarta: Gramedia, 2003*
- *Rosida, Ichen dan Icben, Jakarta: Gramedia, 2003*
- *Anwar Haris, Novel Remaja Islami: Mei Lie, Bandung: DAR! Mizan, 2004*
- *TASARO (Taufiq Saptoto Rohadi), Samita: Sepak Terjang Hui Sing, Murid Perempuan Cheng Ho, Sepak Terjang Pendekar Muslimah di Tanah Jawa, Bandung: DAR! Mizan, 2004*
- *Remy Sylado, Sam Po Kong – Perjalanan Pertama, Jakarta: Gramedia, 2004*

DAFTAR BACAAN

Laporan

1. *Komnas Perempuan, Seri Dokumen Kunci; Temuan Tim Gabungan Pencarian Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, November 1999*
2. *Seri Dokumen Kunci; Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, November 1999*
3. *Komnas Perempuan, Disangkal, 2003*
4. *Komnas Perempuan, Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasn Seksual Mei 1998 dan Dampaknya, 2008*

Buku

1. *Suma Mihardja, Tionghoa di Batavia, 2009*

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta 10310
Tel. +62 21 3903963, Fax. +62 21 3903922
mail@komnasperempuan.or.id
http://www.komnasperempuan.or.id

ISBN: 978-979-26-7567-2



PANDUAN
Mempersiapkan
NAPAK REFORMASI

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

maribicarakebenaran

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih 1
Napak Reformasi 3
Lima Langkah Menyiapkan Napak Reformasi 5
Pelaksanaan Napak Reformasi 12
Tindak Lanjut 13

1. SEKAPUR SIRIH

PANDUAN ini ditujukan untuk menawarkan Napak Reformasi sebagai model upaya merawat ingatan publik pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa pelanggaran HAM yang lebih luas. Merawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang dialami korban merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Padahal proses merawat ingatan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mendapatkan pengakuan publik atas pengalaman-pengalaman korban serta tanggung jawab negara atas peristiwa yang terjadi. Juga, untuk memastikan agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di masa mendatang.

Penamaan Napak Reformasi kami sesuaikan dengan konteks yang ingin disampaikan pada saat kami mempersiapkan model ini, yaitu untuk mengingatkan publik pada tragedi kemanusiaan Mei 1998 dimana terjadi tindak serangan seksual yang diarahkan kepada perempuan etnis Tionghoa dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Tragedi kemanusiaan ini menjadi tonggak perjalanan bangsa Indonesia mereformasi diri-dari tata pemerintahan yang sentralistik-militeristik menuju tata kehidupan bangsa-negara yang demokratis. Dalam pengamatan kami, pengajaran pada anak didik tentang era reformasi jarang mendalami persoalan tragedi Mei 1998, apalagi tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan itu. Padahal, merawat ingatan publik pada peristiwa ini menjadi penting karena sampai hari ini para korban belum lagi memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Napak Reformasi diujicobakan untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Mei 2011, atas dukungan dari 15 lembaga, yaitu Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (PINTI), Solidaritas Nusa Bangsa

(SNB), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Tionghoa Muda (JTM), Forum Keluarga Korban Mei 1998 (FKKM), Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), Paguyuban Korban Mei 1998, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Universitas Kristen Indonesia, Universitas Tarumanagara, Grafisosial, dan Aikon. Dalam ujicoba ini, Napak Reformasi diikuti oleh 29 guru sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan dari 26 sekolah serta 7 jurnalis dari 5 media sebagai peserta Napak Reformasi.

Seluruh proses Napak Reformasi kami rangkum di dalam buku panduan ini. Muatannya akan menekankan pada langkah demi langkah menyiapkan Napak Reformasi sebagai sebuah cara pengajaran sejarah yang menjadi bagian dari upaya memorialisasi sebuah peristiwa pelanggaran HAM dengan menekankan pada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Melalui panduan ini, kami berharap akan turut memunculkan berbagai inisiatif lanjutan dari para pembaca yang berjuang untuk pemenuhan hak-hak korban dalam berbagai konteks peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Semoga panduan ini membantu dan selamat bereksplorasi.

Jakarta, 13 Mei 2012
Komnas Perempuan

2. NAPAK REFORMASI

IDE tentang Napak Reformasi hadir dalam rangka memperingati Tragedi Mei 1998 pada tahun 2011. Napak Reformasi merupakan bagian dari upaya memorialisasi tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa penting–terkait perubahan sistem Orde Baru–menuju masa reformasi; harapan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan peneguhan sistem demokrasi. Harapan yang makin lama terasa menipis karena justru tidak mendapatkan dukungan dari elit politik: kasus penembakan Trisakti oleh DPR dinyatakan bukan pelanggaran HAM berat sehingga tidak ada pertanggungjawaban, demikian pula dengan kasus – kasus pelanggaran HAM lainnya yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Kasus kerusuhan Mei 1998 kerap dipelintir sebagai sekedar pergolakan massa, korban terbakar distigma sebagai penjarah, sementara kasus perkosaan dan serangan seksual disangkal.

Bagi gerakan perempuan, Tragedi Mei 1998 adalah titik balik perjuangan isu Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya kekerasan seksual yang jadi wacana di masyarakat, dan inisiatif untuk mendirikan lembaga pengada layanan yang tumbuh subur hingga sekarang.

MEMORIALISASI merupakan proses pembangunan representasi fisik/bangunan atau ragam kegiatan peringatan sejarah masa lalu dan ditempatkan di wilayah-wilayah publik. Bangunan atau ragam kegiatan dirancang untuk menyuarakan reaksi khusus atau sekumpulan reaksi, termasuk penghargaan dari masyarakat dari sebuah kegiatan atau tokoh di dalamnya; refleksi personal atau duka cita; kebanggaan, kemarahan, atau kesedihan tentang apa yang telah terjadi; atau pembelajaran / keingintahuan tentang sejarah masa lalu. [Rumusan dirangkum dari Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action (2007)]

Upaya masyarakat memperjuangkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 pula yang melahirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Sejak tahun 1998, gerakan masyarakat sipil tak henti mengupayakan inisiatif-inisiatif advokasi hak-hak korban pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru, terutama Tragedi Kemanusiaan Mei 1998. Salah satunya adalah inisiatif untuk melawan lupa, seperti berziarah ke makam massal di TPU Pondok Ranggon, pembuatan prasasti Jarum Mei 1998, Monumen Trisakti, dan persiapan Rumah Kenangan Mei yang artefaknya masih tersimpan di rumah Ibu Ruminah (ibu dari salah satu korban yang terbakar), dan termasuk juga lewat Aksi Kamisan.[1]

Dengan maksud turut mendukung upaya merawat ingatan kolektif masyarakat pada Tragedi kemanusiaan Mei 1998, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mendorong tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak korban dan menumbuhkan komitmen bangsa agar peristiwa serupa tidak berulang di masa mendatang, Komnas Perempuan menyelenggarakan Napak Reformasi sebagai sebuah alternatif cara memorialisasi.

Napak Reformasi didesain dalam bentuk *tour*, semacam perjalanan wisata sejarah, dimana para peserta diajak mengunjungi berbagai situs penting dalam peristiwa itu dan juga situs-situs yang melambangkan inisiatif masyarakat serta mengupayakan pemulihan hak-hak korban. Dari satu titik situs ke situs berikutnya, peserta memperoleh

---

[1] *Aksi Kamisan dilakukan sejak tahun 2006 hingga sekarang di Depan Istana Presiden oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dan jaringannya. JSKK melakuankan aksi berdiri dan diam setiap hari kamis pukul 16.00 – 17.00 Wib. Berdiri merupakan simbol bahwa korban adalah warga negara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hak. Sedangkan diam menunjukkan bahwa korban bukan perusuh, bukan warga negara yang susah diatur dan bukan warga negara yang membuat keributan. Dalam aksi kamisan para korban mengenakan busana hitam-hitam dan payung hitam. Warna hitam dipilih sebagai simbol keteguhan dan semangat perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu para korban mengirimkan surat kepada Presiden agar segera menuntaskan dan mengadili pelaku pelanggaran HAM serta memulihkan hak-hak korban.*

penjelasan tentang latar belakang, kejadian, dan dampak dari Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 bagi negara-bangsa Indonesia. Di beberapa situs, peserta juga dapat berinteraksi dengan komunitas korban dan masyarakat sipil penggagas situs. Di penghujung perjalanan, peserta diminta untuk melakukan refleksi pada perjalanan tersebut sebagai ruang untuk meneguhkan komitmen bersama mendukung upaya pemenuhan hak-hak korban dan mengupayakan agar peristiwa serupa tak berulang di masa depan.

Desain Napak Reformasi dalam bentuk *tour* ini dipilih dengan dua alasan utama. Pertama, meneguhkan inisiatif-inisiatif yang ada di dalam masyarakat. Kedua, dapat menjadi cara bagi para guru memperkenalkan sejarah kepada murid-muridnya, terutama ketika mengajarkan tentang perjalanan reformasi Indonesia. Dengan begitu, Napak Reformasi dihadirkan sebagai tawaran metodologi pengajaran guna mengintegrasikan peristiwa pelanggaran HAM berbasis gender dalam pendidikan sejarah nasional Indonesia.

3. LIMA LANGKAH MENYIAPKAN NAPAK REFORMASI

PERSIAPAN Napak Reformasi dirangkum dalam lima langkah, yaitu (1) mengumpulkan informasi atau materi dasar, (2) identifikasi situs memorialisasi, (3) konsultasi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping, (4) finalisasi persiapan, dan (5) ujicoba rute dan alur.

1. Mengumpulkan informasi atau materi dasar

Langkah mengumpulkan informasi atau materi dasar dilakukan segera setelah penentuan Tragedi Mei 1998 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang hendak diperingati, dengan memberikan penekanan khusus pada peristiwa kekerasan terhadap perempuan

dalam tragedi tersebut. Informasi atau materi yang digali adalah tentang peristiwa Tragedi Mei 1998, tentang inisiatif memorialisasi dan penyelenggaraan perjalanan wisata sejarah. Ketiga informasi kunci ini menjadi landasan pengembangan materi informasi bagi peserta dan pengembangan konsep Napak Reformasi.

- **Peristiwa Tragedi Mei 1998**

  Informasi tentang peristiwa Mei 1998 berangkat dari berbagai sumber dan referensi tentang latar belakang, kejadian dan dampak peristiwa, respon pemerintah dan aktivis perempuan, inisiatif komunitas korban dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Mengingat bahwa peristiwa ini masih dipandang kontroversial, materi otoritatif menjadi rujukan utama, seperti laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998, Laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kekerasan terhadap Perempuan tentang Misinya Ke Indonesia dan Timor Timur, dan Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

- **Konsep dan contoh memorialisasi pelanggaran HAM yang pernah dikembangkan di berbagai negara**

  Agar Napak Reformasi dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak-hak korban, khususnya perempuan, maka penyelenggaraan Napak Reformasi harus kuat secara konsep. Untuk itu, tim mendalami berbagai materi rujukan yang tersedia tentang konsep memorialisasi dan bagaimana konsep ini diwujudkan di beberapa negara. Proses pendalaman menjadi ruang mengingat prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah upaya memorialisasi. Prinsip-prinsip itu kemudian diturunkan dalam proses persiapan dan pelaksanaan Napak Reformasi.

Prinsip Memorialisasi Pelanggaran HAM[2] :

Prinsip Memorialisasi Pelanggaran HAM :

- **Representasi publik:**

Memorialisasi harus merupakan representasi fisik/ bangunan atau ragam kegiatan peringatan sejarah masa lalu dan ditempatkan di wilayah-wilayah publik.

- **Keterlibatan komunitas:**

Komunitas korban menjadi kunci dalam memorialisasi, keterlibatan komunitas harus dimaksimalkan dalam memorialisasi. Keterlibatan pembangunan memorial melalui pertemuan-pertemuan insiator.

- **Keterlibatan Pemerintah:**

Pemerintah merupakan aktor kunci dalam mendukung sebuah memorialisasi salah satunya melalui kebijakan publik. Dengan demikian, pembangunan memorial tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya pembangunan lainnya melainkan melengkapi pelengkap apa yang telah ada.

- **Konstruktif:**

Memorialisasi harus dapat berperan secara konstruktif dalam pembentukan budaya demokrasi sehingga harus ditangani secara serius dalam segala macam proyek pembangunan demokrasi.

- **Pendidikan publik:**

Memorialisasi harus dapat menjadi pendidikan publik bagi siapa saja sehingga dapat mewujudkan sebuah keadilan, rekonsiliasi, reparasi dan perbaikan masa lalu.

Model wisata sejarah

Karena ide awal dari Napak Reformasi adalah dalam bentuk wisata sejarah, maka tim menjajaki berbagai model wisata sejarah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengikuti *Tour* sejarah yang dilaksanakan

[2] *Sinopsis dari artikel : Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action (2007).Hasil laporan ICTJ oleh: Sebastian Brett, Louis Bickford, Liz Ševenko dan Marcela Rios. Tentang Program Memori, Memorial dan Museum ICTJ dapat diakses di: http://www.ictj.org/en/tj/785.html. Untuk mengunduh laporan secara utuh dalam bahasa Inggris dapat diakses di: http://www.ictj.org/images/content/9/8/981.pdf*

oleh Komunitas Sahabat Museum di Jakarta. Tim Napak Reformasi juga mengumpulkan dan mempelajari berbagai materi yang disediakan oleh komunitas wisata sejarah yang tersedia di beberapa negara. Ide-ide dari pengalaman dan materi tersebut kemudian didiskusikan sebagai model wisata sejarah yang mungkin dapat diadopsi untuk Napak Reformasi. Dari diskusi dengan salah satu penggagas Komunitas Sahabat Museum, tim Napak Reformasi menemukenali langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyiapkan sebuah paket wisata sejarah, sebagaimana yang dipaparkan dalam bagian ini.

2. Identifikasi Situs Memorialisasi;

Observasi lapangan

Tim Napak Reformasi melakukan kunjungan ke lokasi - lokasi tempat terjadinya peristiwa Tragedi Mei 1998 serta mencari informasi lengkap tentang lokasi tersebut. Informasi – informasi tersebut penting untuk melengkapi materi yang akan disampaikan selama *tour*.

Wawancara narasumber

Tim Napak Reformasi melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki informasi tentang Tragedi Mei 1998 dan peristiwa- peristiwa untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Selain mendapatkan informasi, narasumber juga penting dimintai masukan, saran serta dukungan terkait *tour* Napak Reformasi.

Riset literatur

Tim Napak Reformasi mencari informasi dari berbagai sumber seperti pusat data media, *website*, karya-karya sastra, dokumentasi dan publikasi-publikasi yang memuat berita terkait peristiwa Tragedi Mei 1998.

3. Konsultasi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping;

Membangun persepsi, kesepakatan serta dukungan tentang kegiatan memorialisasi

Tim Napak Reformasi mengadakan diskusi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping untuk meminta pendapat, mendapatkan dukungan, serta kesepakatan termasuk kesediaan menjadi bagian dari acara. Diskusi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping dilakukan beberapa kali untuk membangun kesamaan persepsi tentang konsep acara yang akan dilaksanakan.

Penajaman konsep

Dalam rangka penajaman konsep, konsultasi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping juga menjadi sarana meminta masukan tentang materi dan narasi Napak Reformasi, mengidentifikasi peserta, penutur atau *guide tour*, dan situs-situs Tragedi Mei 1998.

Membuat agenda *tour* dan alur

Dalam konsultasi, komunitas korban dan lembaga pendamping memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Tim Napak Reformasi tentang jadual acara yang berisikan waktu, durasi dan lokasi yang akan dikunjungi serta materi yang akan disampaikan baik dalam perjalanan maupun di setiap perhentian. Agenda *tour* dan alur sangat penting sebagai panduan bagi pendukung acara terutama penutur dalam memberi penjelasan selama proses berlangsung.

4. Finalisasi persiapan;

Diskusi dengan potensial peserta

Tim Napak Reformasi melakukan diskusi dengan calon peserta Napak Reformasi, yaitu komunitas guru-guru sejarah. Diskusi ini

diharapkan memperoleh masukan terkait dengan susunan acara serta teknis pelaksanaan Napak Reformasi.

- **Penulisan lembar informasi untuk peserta**

Tim Napak Reformasi menyiapkan lembar informasi tentang peristiwa Tragedi Mei 1998 sebagai bahan pendukung selama kegiatan berlangsung. Lembar informasi ini juga melengkapi informasi yang tidak disampaikan oleh penutur selama perjalanan Napak Reformasi. Lembar informasi ini akan dibagikan pada peserta sebelum kegiatan dimulai.

- **Diskusi dengan penutur**

Diskusi dilakukan agar penutur memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tujuan dan muatan Napak Reformasi. Kepada penutur, tim Napak Reformasi menginformasikan asal dan jumlah peserta, alokasi waktu serta materi-materi yang prioritas untuk disampaikan ketika berada di lokasi atau selama perjalanan. Masukan penutur sangat penting untuk mendukung proses agar berjalan dengan lancar.

- **Koordinasi dengan pihak-pihak terkait**

Agar kegiatan berjalan dengan lancar, Tim Napak Reformasi berkoordinasi dengan pihak keamanan, kelurahan setempat serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi yang akan dikunjungi. Koordinasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi menemui tokoh-tokoh tersebut dan mengirimkan surat pemberitahuan beberapa hari sebelum acara berlangsung. Dengan koordinasi ini, semua pihak mengetahui tentang acara yang akan dilaksanakan sekaligus dapat mendukung pelaksanaan keseluruhan proses.

5. Uji coba Rute dan Alur

Ujicoba rute untuk mendapatkan gambaran berapa lama waktu dan jarak tempuh yang dibutuhkan secara keseluruhan termasuk jarak dan waktu dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Tim Napak Reformasi memastikan waktu tempuh yang diperlukan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, serta alur dengan melakukan ujicoba rute.

Dalam mempersiapkan sebuah Napak Reformasi yang tidak kalah penting untuk dipikirkan adalah ketersediaan dana terkait pembiayaan keseluruhan proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan Napak Reformasi.

Alur Informasi Napak Reformasi



4. PELAKSANAAN NAPAK REFORMASI

1. Bersiap-siap

Pada surat undangan kegiatan, Tim Napak Reformasi menginformasikan kepada peserta titik atau lokasi berkumpul. Setelah peserta tiba, tim meminta peserta mengisi daftar hadir, membagi lembar informasi, lalu memberikan penjelasan singkat tentang Napak Reformasi, alur, dan siapa saja yang bertugas selama Napak Reformasi berlangsung.

2. Perjalanan menuju situs

Seluruh kegiatan Napak Reformasi dipandu oleh dua orang penutur. Penutur menceritakan rangkaian informasi terkait peristiwa yang diperingati sesuai dengan alur yang telah disepakati. Rangkaian informasi itu hanya disampaikan ketika dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, atau pada saat berada di dalam bis dan saat jalan kaki menuju lokasi atau kembali ke bis. Pada kesempatan ini, penutur juga dapat memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat bersejarah lainnya yang dilewati oleh peserta.

3. Saat di situs atau lokasi memorialisasi

Seorang narasumber sebelumnya telah disiapkan di masing-masing situs. Narasumber inilah yang memperkenalkan dan memberi penjelasan tentang situs. Narasumber di tiap lokasi berasal dari pihak pengelola situs tersebut, tidak saja karena memiliki informasi yang lebih banyak tentang situs tersebut tetapi juga sebagai apresiasi pada inisiatifnya membangun dan merawat situs memorialisasi.

4. Interaksi dengan komunitas korban

Salah satu agenda penting dalam Napak Reformasi adalah

interaksi antara peserta dengan komunitas korban saat mengunjungi situs memorialisasi. Interaksi ini bertujuan membangun keakraban antara peserta dengan komunitas korban sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi komunitas korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam interaksi ini juga menjadi ruang bagi komunitas korban untuk menceritakan pengalamannya, pemaknaan dirinya pada pengalaman itu dan harapannya, misalnya saja agar peserta turut menghapus stigma penjarah terhadap korban yang terbakar di Plaza Yogja Klender yang beredar selama ini.

5. Refleksi komunitas korban, peserta Napak Reformasi dan pendamping

Pada akhir kegiatan, di situs terakhir yang dikunjungi, peserta dan seluruh elemen yang terlibat melakukan dialog reflektif. Ini adalah ruang bagi setiap peserta untuk mengungkapkan kesan, harapan, termasuk masukan untuk perbaikan Napak Reformasi ini. Kesempatan ini juga dapat dimaknai sebagai ruang konsolidasi membahas agenda tindak lanjut untuk kerja-kerja advokasi ke depan.

5. TINDAK LANJUT

BUTIR-BUTIR usulan tindak lanjut di bawah ini adalah rangkuman hasil dialog reflektif peserta dan seluruh elemen yang terlibat dalam Napak Reformasi. Dialog diadakan di pelantaran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, salah satu situs memorialisasi peristiwa Mei 1998 dan situs terakhir yang dikunjungi oleh peserta Napak Reformasi. Dalam dialog ini, hadir pula komunitas korban dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang juga belum memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Publikasi dan distribusi materi Napak Reformasi

Dengan ikut serta dalam Napak Reformasi, peserta mendapatkan informasi yang lebih utuh tentang peristiwa Tragedi Mei 1998 dan berinteraksi dengan komunitas korban. Kesempatan ini memungkinkan peserta tidak saja memahami persoalan dan memetik pembelajaran dari Tragedi Mei 1998, melainkan juga tergugah untuk turut mendukung upaya korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena itu, materi Napak Reformasi perlu dipublikasikan agar tersedia bagi lebih banyak kalangan agar ada lebih banyak lagi masyarakat yang ikut serta mendukung upaya korban.

Integrasi dalam kurikulum sejarah nasional

Tragedi Mei 1998 belum menjadi bagian dalam mata pelajaran sejarah nasional yang diajarkan kepada generasi muda. Padahal, pengenalan pada peristiwa ini sangat penting sebagai upaya untuk mencegah berulangnya pelanggaran atau kekerasan serupa di masa mendatang, selain untuk memastikan korban dapat menikmati haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Sebaliknya, jika tidak segera menjadi bagian yang terintegrasi dalam pendidikan sejarah nasional, maka kekerasan seksual akan terus-menerus disangkal dan stigma penjarah terhadap korban yang terbakar di pusat-pusat perbelanjaan tetap langgeng. Untuk itu, Komnas Perempuan dan komunitas korban diminta untuk melanjutkan upayanya melakukan advokasi kepada institusi pendidikan. Upaya ini perlu melibatkan MGMP Sejarah, AGSI Provinsi DKI Jakarta, sehingga berbagai temuan pelanggaran HAM dalam Tragedi Mei 1998 dapat menjadi materi dalam kurikulum pendidikan sejarah tentang reformasi Indonesia, dan metode Napak Reformasi dapat menjadi salah satu metodologi pengajarannya.

Menggiatkan kampanye publik

Agar lebih banyak pihak memahami Tragedi Mei 1998, maka informasi tersebut harus secara rutin disampaikan kepada masyarakat lewat berbagai kegiatan kampanye. Kegiatan-kegiatan kampanye tersebut sebaiknya tidak hanya pada saat peringatan Tragedi Mei 1998 saja, tetapi dapat dilangsungkan sepanjang tahun. Informasi tersebut juga dapat disampaikan dalam keterkaitannya dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang lain.

Merawat Situs Memorialisasi

- Prasasti Jarum Mei yang terletak di Kampung Klender merupakan situs penting Peristiwa Tragedi Mei 1998. Prasasti yang digagas oleh komunitas korban Mei 1998 pada tahun 2009 saat ini dirawat atas inisiatif pribadi. Di samping kendala biaya, perawatan prasasti juga berhadapan dengan kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah pada arti penting prasasti tersebut bagi keberlanjutan upaya pemenuhan hak korban. Karena kurang dukungan, hampir saja pada tahun 2010 prasasti ini hendak digusur dengan alasan penghijauan. Berkat advokasi bersama, penggusuran tidak jadi dilakukan. Merespon kondisi ini, Komnas Perempuan diminta untuk berdiskusi dengan berbagai pihak yaitu komunitas korban, lembaga pendamping dan tokoh masyarakat untuk mendukung kehadiran prasasti tersebut dengan turut mendukung rencana-rencana perbaikan, perawatan dan mengkampanyekannya kepada publik secara lebih luas.
- Kuburan massal korban Tragedi Mei 1998 salah satunya terdapat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Setidaknya terdapat 213 makam korban yang terbakar dalam Tragedi Mei 1998. Hingga saat ini, tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah tentang makam tersebut sebagai situs

pengingat Tragedi Mei 1998. Ketidakjelasan pengelolaan kuburan massal di TPU Pondok Ranggon menyebabkan situs tersebut tidak dirawat dengan baik. Seringkali biaya perawatan dibebankan kepada keluarga korban yang datang berziarah pada saat peringatan Tragedi Mei 1998. Karena Tragedi Mei 1998 dianggap sebagai peristiwa politik, maka izin pengelolaan massal pun, seperti usulan untuk membuat prasasti, harus melewati keputusan yang lebih tinggi.

Melanjutkan advokasi pengusutan tuntas Tragedi Mei 1998

Sementara upaya memelihara ingatan publik pada peristiwa Tragedi Mei 1998 sebagai sebuah pembelajaran penting bagi perjalanan berbangsa dan bernegara, pengusutan tuntas Tragedi Mei 1998 dengan berangkat dari temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-15 Mei 1998 perlu untuk tetap didesakkan. Pengusutan yang tuntas akan menguatkan komitmen untuk memutus rantai impunitas dan menghadirkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Pengusutan tuntas ini juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggungjawab negara pada pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta 10310
Tel. +62 21 3903963, Fax. +62 21 3903922
mail@komnasperempuan.or.id
http://www.komnasperempuan.or.id

ISBN: 978-979-26-7568-9









5 LANGKAH Menyiapkan NAPAK REFORMASI

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

maribicarakebenaran

1 MENGUMPULKAN INFORMASI ATAU MATERI DASAR

1.1 Peristiwa Tragedi Mei 1998

Informasi tentang peristiwa Mei 1998 berangkat dari berbagai sumber dan referensi tentang latar belakang, kejadian dan dampak peristiwa, respon pemerintah dan aktivis perempuan, inisiatif komunitas korban dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Mengingat bahwa peristiwa ini masih dipandang kontroversial, materi otoritatif menjadi rujukan utama, seperti laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, Laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kekerasan terhadap Perempuan tentang Misinya Ke Indonesia dan Timor Timur, dan Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.



1.2 Konsep dan contoh memorialisasi pelanggaran HAM yang pernah dikembangkan di berbagai negara

Agar Napak Reformasi betul dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak-hak korban, khususnya perempuan, maka penyelenggaraan Napak Reformasi harus kuat secara konsep. Untuk itu, tim mendalami berbagai materi rujukan yang tersedia tentang konsep memorialisasi dan bagaimana konsep ini diwujudkan di beberapa negara. Proses pendalaman menjadi ruang mengingat prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah upaya memorialisasi. Prinsip-prinsip itu kemudian diturunkan dalam proses persiapan dan pelaksanaan Napak Reformasi.

Prinsip Memorialisasi Pelanggaran HAM :

- **Representasi publik:**

Memorialisasi harus merupakan representasi fisik/ bangunan atau ragam kegiatan peringatan sejarah masa lalu dan ditempatkan di wilayah-wilayah publik.

- **Keterlibatan komunitas:**

Komunitas menjadi kunci dalam memorialisasi, keterlibatan komunitas harus dimaksimalkan dalam pembangunan memorial melalui pertemuan-pertemuan insiator.

- **Keterlibatan Pemerintah:**

Pemerintah merupakan aktor kunci dalam mendukung sebuah memorialisasi salah satunya melalui kebijakan publik, sehingga pembangunan memorial tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya pembangunan lainnya melainkan pelengkap apa yang telah ada.

- **Konstruktif:**

Memorialisasi harus dapat berperan secara konstruktif dalam pembentukan budaya demokrasi sehingga harus ditangani secara serius dalam segala macam proyek pembangunan demokrasi.

- **Pendidikan publik:**

Memorialisasi harus dapat menjadi pendidikan publik bagi siapa saja sehingga dapat mewujudkan sebuah keadilan, rekonsiliasi, reparasi dan perbaikan masa lalu.



Choeung Ek Killing Fields: Ladang Pembantaian Manusia di Kamboja

Memorialisasi Jugun Ianfu, Tokyo



1.3 Model wisata sejarah

Karena ide awal dari Napak Reformasi adalah dalam bentuk wisata sejarah, maka tim menjajaki berbagai model wisata sejarah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengikuti *Tour* sejarah yang dilaksanakan oleh Komunitas Sahabat Museum di Jakarta. Tim Napak Reformasi juga mengumpulkan dan mempelajari berbagai materi yang disediakan oleh komunitas wisata sejarah yang tersedia di beberapa negara. Ide-ide dari pengalaman dan materi tersebut kemudian didiskusikan sebagai model wisata sejarah yang mungkin dapat diadopsi untuk Napak Reformasi. Dari diskusi dengan salah satu penggagas Komunitas Sahabat Museum, tim Napak Reformasi menemukenali langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyiapkan sebuah paket wisata sejarah, sebagaimana yang dipaparkan dalam bagian ini.



2 IDENTIFIKASI SITUS MEMORIALISASI

2.1 Observasi lapangan

Tim Napak Reformasi melakukan kunjungan ke lokasi - lokasi tempat terjadinya peristiwa Tragedi Mei 1998 serta mencari informasi lengkap tentang lokasi tersebut. Informasi – informasi tersebut penting untuk melengkapi materi yang akan disampaikan selama *tour*.



2.2 Wawancara narasumber

Tim Napak Reformasi melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki informasi tentang Tragedi Mei 1998 dan peristiwa-peristiwa untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Selain mendapatkan informasi, narasumber juga penting dimintai masukan, saran serta dukungan terkait *tour* Napak Reformasi.



2.3 Riset literatur



Tim Napak Reformasi mencari informasi dari berbagai sumber seperti pusat data media, *website*, karya-karya sastra, dokumentasi dan publikasi-publikasi yang memuat berita terkait peristiwa Tragedi Mei 1998.

3 KONSULTASI DENGAN KOMUNITAS KORBAN DAN LEMBAGA PENDAMPING

3.1 Membangun persepsi, kesepakatan serta dukungan tentang kegiatan memorialisasi

Tim Napak Reformasi mengadakan diskusi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping untuk meminta pendapat, mendapatkan dukungan, serta kesepakatan termasuk kesediaan menjadi bagian dari acara. Diskusi dengan berbagai pihak diatas dilakukan beberapa kali untuk membangun kesamaan persepsi tentang konsep acara yang akan dilaksanakan.



3.2 Penajaman konsep

Dalam rangka penajaman konsep, konsultasi dengan komunitas korban dan lembaga pendamping juga menjadi sarana meminta masukan tentang materi dan narasi Napak Reformasi, mengidentifikasi peserta, penutur atau *guide tour*, dan situs-situs Tragedi Mei 1998.



3.3 Membuat agenda *tour* dan alur



Dalam konsultasi, komunitas korban dan lembaga pendamping memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Tim Napak Reformasi tentang jadual acara yang berisikan waktu, durasi dan lokasi yang akan dikunjungi serta materi yang akan disampaikan baik dalam perjalanan maupun di setiap perhentian. Agenda *tour* dan alur sangat penting sebagai panduan bagi pendukung acara terutama penutur dalam memberi penjelasan selama proses berlangsung.

4 FINALISASI PERSIAPAN

4.1 Diskusi dengan potensial peserta

Tim Napak Reformasi melakukan diskusi dengan calon peserta Napak Reformasi, yaitu komunitas guru-guru sejarah. Diskusi ini diharapkan memperoleh masukan terkait dengan susunan acara serta teknis pelaksanaan Napak Reformasi.



4.2 Penulisan lembar informasi untuk peserta

Tim Napak Reformasi menyiapkan lembar informasi tentang peristiwa Tragedi Mei 1998 sebagai bahan pendukung selama kegiatan berlangsung. Lembar informasi ini juga melengkapi informasi yang tidak disampaikan oleh penutur selama perjalanan Napak Reformasi. Lembar informasi ini akan dibagikan pada peserta sebelum kegiatan dimulai.



4.3 Diskusi dengan penutur

Diskusi dilakukan agar penutur memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tujuan dan muatan Napak Reformasi. Kepada penutur, tim Napak Reformasi menginformasikan asal dan jumlah peserta, alokasi waktu serta materi-materi yang prioritas untuk disampaikan ketika berada di lokasi atau selama perjalanan. Masukan penutur sangat penting untuk mendukung proses agar berjalan dengan lancar.



4.3 Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Agar kegiatan berjalan dengan lancar, Tim Napak Reformasi berkoordinasi dengan pihak keamanan, Kelurahan setempat serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi yang akan dikunjungi. Koordinasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi menemui tokoh-tokoh tersebut dan mengirimkan surat pemberitahuan beberapa hari sebelum acara berlangsung. Dengan koordinasi ini, semua pihak mengetahui tentang acara yang akan dilaksanakan sekaligus dapat mendukung pelaksanaan keseluruhan proses.



5 UJI COBA RUTE DAN ALUR

5.1 Bersiap-siap

Pada surat undangan kegiatan, Tim Napak Reformasi menginformasikan kepada peserta titik atau lokasi berkumpul. Setelah peserta tiba, tim meminta peserta mengisi absensi, membagi lembar informasi, lalu memberikan penjelasan singkat tentang Napak Reformasi, alur, dan siapa saja yang bertugas selama Napak Reformasi berlangsung.



5.2 Perjalanan menuju situs

Seluruh kegiatan Napak Reformasi dipandu oleh dua orang penutur. Penutur menceritakan rangkaian informasi terkait peristiwa yang diperingati sesuai dengan alur yang telah disepakati. Rangkaian informasi itu hanya disampaikan ketika dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, atau pada saat berada di dalam bis dan saat jalan kaki menuju lokasi atau kembali ke bis. Pada kesempatan ini, penutur juga dapat memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat bersejarah lainnya yang dilewati oleh peserta.



5.3 Saat di situs atau lokasi memorialisasi



Seorang narasumber sebelumnya telah disiapkan di masing-masing situs. Narasumber inilah memperkenalkan dan memberi penjelasan tentang situs. Narasumber di tiap lokasi berasal dari pihak pengelola situs tersebut, tidak saja karena memiliki informasi yang lebih banyak tentang situs tersebut tetapi juga sebagai apresiasi pada inisiatifnya membangun dan merawat situs memorialisasi.

5.4 Interaksi dengan komunitas korban



Salah satu agenda penting dalam Napak Reformasi adalah interaksi antara peserta dengan komunitas korban saat mengunjungi situs memorialisasi. Interaksi ini bertujuan membangun keakraban antara peserta dengan komunitas korban sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi komunitas korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam interaksi ini juga menjadi ruang bagi komunitas korban untuk menceritakan pengalamannya, pemaknaan dirinya pada pengalaman itu dan harapannya, misalnya saja agar peserta turut menghapus stigma penjarah terhadap korban yang terbakar di Mall Plaza Yogja Klender yang beredar selama ini.

5.5 Refleksi komunitas korban, peserta Napak Reformasi dan pendamping



Pada akhir kegiatan, di situs terakhir yang dikunjungi, peserta dan seluruh komponen yang terlibat melakukan dialog reflektif. Ini adalah ruang bagi setiap peserta untuk mengungkapkan kesan, harapan, termasuk masukan untuk perbaikan Napak Reformasi ini. Kesempatan ini juga dapat dimaknai sebagai ruang konsolidasi membahas agenda tindak lanjut untuk kerja-kerja advokasi ke depan.

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta 10310
Tel. +62 21 3903963, Fax. +62 21 3903922
mail@komnasperempuan.or.id
http://www.komnasperempuan.or.id

ISBN: 978-979-26-7569-6

NAPAK REFORMASI

MERAWAT ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang dialami korban merupakan proses yang tidak mudah. Komnas Perempuan menggagas sebuah proses merawat ingatan publik atas pelanggaran HAM yang terjadi melalui kunjungan pada situs-situs ingatan Tragedi Mei 1998. Gagasan tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan NAPAK REFORMASI, penamaan ini disesuaikan dengan konteks tragedi kemanusiaan 1998. Dalam tragedi ini, terjadi tindak serangan seksual di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya yang kebanyakan korban adalah perempuan etnis Tionghoa.

Gagasan untuk mengunjungi situs ingatan tidak lepas dari dukungan dan konsultasi antara Komnas Perempuan dengan komunitas korban dan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta. Organisasi tersebut adalah Perempuan Indonesia Tionghoa (PINTI), Indonesia Tionghoa (INTI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), Jaringan Tionghoa Muda (JTM), Forum Komunikasi Keluarga Korban Mei 1998 (FKKM), Paguyuban Keluarga Korban Mei 1998, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah di Provinsi DKI Jakarta serta Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).

Napak Reformasi adalah salah satu mata rantai kegiatan Kampanye Mari Bicara Kebenaran.

KAMPANYE MARI BICARA KEBENARAN

SEJAK diluncurkan pada tahun 2009, Kampanye “Mari Bicara Kebenaran” menjadi sebuah gerakan untuk mengajak setiap orang membuka diri pada sejarah kelam Indonesia. Membuka diri untuk membangun keakraban, artinya menyimak serta mendengarkan penuturan para korban yang merupakan bagian yang tak terlepas dari perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan ini juga mengajak masyarakat tidak menghakimi korban apalagi menyalahkan mereka atas dampak yang dialami. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama melawan lupa untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang.

Gerakan ini dilambangkan dengan sirih dan pinang. Dalam banyak tradisi, sirih dan pinang dipakai untuk membuka diri untuk membangun dialog dalam sebuah hubungan panjang. Baik itu hubungan baru maupun memperbaiki hubungan yang sempat terganggu. Sirih dan pinang juga dimaknai sebagai lambang kepercayaan.

PETA SITUS INGATAN TRAGEDI MEI 1998



NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PETA SITUS INGATAN TRAGEDI MEI 1998

EMPAT belas tahun reformasi bergulir di Indonesia, namun para korban Tragedi Mei 1998 termasuk di dalamnya perempuan korban kekerasan seksual belum memperoleh hak-hak mereka atas kebenaran, keadilan serta pemulihan. Rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh pemerintah belum sepenuhnya diupayakan oleh pemerintah. Bahkan negara seolah-olah melanggengkan impunitas bagi pelaku dan membiarkan kontroversi seputar Tragedi Mei 1998 menjadi penghalang bagi penyelenggaraan rehabilitasi dan kompensasi bagi korban.

Lemahnya keberpihakan pemerintah pada penegakan HAM serta upaya pemulihan korban mendorong masyarakat sipil membuat inisiatif-inisiatif sebagai upaya menggalang dukungan publik untuk perjuangan korban. Di antaranya adalah aksi diam dan berdiri di depan istana negara yang dilakukan setiap hari kamis serta membuat media-media pengingat, seperti Prasasti Jarum Mei 1998.

Dengan melakukan kunjungan ke situs-situs terkait kejadian dan ingatan pada Tragedi Mei 1998 di Jakarta, kita dapat merawat ingatan atas terjadinya pelanggaran HAM masa lalu, khususnya tragedi kemanusiaan Mei 1998, agar ia tidak berulang di masa depan.

Berikut situs-situs yang mewakili tempat terjadinya tragedi Mei 1998 dan beberapa situs pendukung.





1 Prasasti Jarum Mei 1998

Prasasti yang didesain bersama komunitas korban, khususnya para ibu yang kehilangan anak-anak mereka dalam Tragedi Mei 1998 dengan budayawan Eka Budianta. Prasasti ini melambangkan tekad dan harapan untuk menjahit dan menyembuhkan luka-luka bangsa.
Prasasti terletak di pinggir kali RW 08/ RT 02 Kelurahan Jatinegara Kaum Pulo Gadung, Jakarta Timur.



2 Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon

Diketahui sedikitnya ada delapan kuburan masal korban tragedi Mei 1998 di Jakarta. Salah satunya terletak di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Cipayung Jakarta Timur. Di sini ada 213 makam, dengan posisi di Blad 27, Blok AA1.



3 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) adalah salah satu tempat pertolongan pertama dan pengumpulan jenazah korban kerusuhan.
RSCM terletak di Jalan Salemba, Jakarta Pusat.



4 Pertokoan Glodok

Pertokoan dan perumahan milik etnis Tionghoa menjadi sasaran utama kerusuhan 1998, termasuk kompleks pertokoan Glodok yang dirusak, dijarah serta dibakar. Kompleks pertokoan ini berada di Jakarta Barat.



5 Plaza Yogya Klender

Plaza yang dibakar serta menewaskan banyak korban yang berasal dari wilayah kelurahan Jatinegara Kaum. Plaza ini terletak di Klender Jakarta Timur. Saat ini plaza Yogya berganti nama menjadi Mall Citra Klender.



6 Monumen Trisakti 12 Mei 1998 dan Museum Trisakti

Monumen yang menjulang tinggi menggambarkan rasa kecewa, dan marah karena penanganan kasus yang tak kunjung tuntas. Di sekitar monumen terdapat lambang dimana 4 (empat) orang mahasiswa tertembak.
Selain monumen, di salah satu gedung Universitas Trisakti terdapat museum yang memuat foto-foto aksi mahasiswa, peluru yang mengakibatkan para mahasiswa meninggal, gas air mata serta beberapa barang pribadi korban.
Di setiap titik terjadinya penembakan dibuat lingkaran logam menempel di aspal, sebagai penanda robohnya tubuh para mahasiswa.
Museum Trisakti dibuka untuk umum setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 09.00 sampai dengan 17.00 Wib.
Monumen Trisakti 12 Mei 1998 serta Museum Trisakti terletak:
Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta 11440
Telepon: (+6221) 5663232 ext. 8128, 8140 Fax: (+6221) 5671356
Website: http://www.trisakti.ac.id



7 Bundaran Hotel Indonesia (HI)

Tempat yang biasanya dipilih untuk melakukan aksi dan menyuarakan aspirasi masyarakat sipil kepada pemerintah agar memberikan keadilan bagi sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia.
Hotel Indonesia terletak di Jalan MH Thamrin No.1 Jakarta 10310.

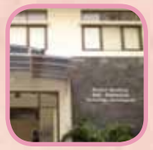

8 Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga Negara independen, dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil yang berakar pada tragedi kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.
Komnas Perempuan terletak di Jalan Latuharhari No.4B,
Menteng Jakarta Pusat 10310
Telepon: (+6221) 3903963 , Fax: (+6221) 3903922
Email: mail@komnasperempuan.or.id
Website: www.komnasperempuan.or.id



9 Gedung MPR/DPR RI

Tempat wakil rakyat berkantor menjadi muara masyarakat sipil melakukan aksi dan menyuarakan aspirasi agar penyelenggara negara memberikan keadilan bagi sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia.
Gedung MPR/DPR RI terletak di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.



10 Istana Negara

Aksi Kamisan, yaitu aksi diam komunitas korban menuntut keadilan bagi sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia dilaksanakan di depan gedung ini, tempat Presiden berkantor.
Istana Negara terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.



11 Gedung 13-14 Mei 1998 Teater Utan Kayu

Komunitas Jurnalis yang menamai dirinya Institut Studi Arus Informasi (ISAI) mengabadikan nama salah satu gedung dengan nama 13-14 Mei 1998. Tujuannya agar masyarakat terus mengingat peristiwa penting yang terjadi tahun1998.
Gedung 13-14 Mei 1998 terletak di Jalan Utan Kayu No.68H Jakarta 13120
Telepon: (+6221) 85905319

Situs Pendukung:



12 Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah

Sejak reformasi tahun 1998, keberadaan masyarakat Tionghoa mulai diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
Pada tahun 2004, Yayasan Harapan Kita selaku pengelola Taman Mini Indonesia Indah mengalokasikan lahan seluas 4,5 hektar untuk membangun suatu wahana Tionghoa, yang kemudian dinamakan Taman Budaya Tionghoa.
Taman Budaya Tionghoa terletak di Komplek Taman Mini Indonesia Indah Kav : 68
Jalan Raya Hankam , Jakarta Timur
Telepon: (+6221) 87782910 , Fax: (+6221) 87782911
E-mail: tamanbudayationghoa@yahoo.com
Website: http://www.taman-tionghoa.com



13 Makam Souw Beng Kong

Souw Beng Kong (1580-1644) merupakan Kapiten I yang dipilih Gubernur Jenderal Belanda JP Coen untuk menjaga ketertiban saat Belanda berpindah dari Banten ke Batavia pada tahun 1619. Kapiten inilah yang bertanggung jawab mengurusi penduduk Tionghoa beserta adat istiadat Tionghoa, dan bertindak sebagai juru bicara komunitas Tionghoa. Saat ini Yayasan Souw Beng Kong yang bertanggung jawab terhadap makam Souw Beng Kong.
Yayasan Makam Souw Beng Kong terletak di Jalan Kebon Jeruk 15 No.13
Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160.
Telepon: (+6221) 6120473, Fax: (+6221) 6120479
Makam Souw Beng Kong di atas tanah seluas 20.000 meter yang terletak di pemukiman di Gang Taruna di Jalan Pangeran Jayakarta Rt.002/Rw.007, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.



14 Pusat Kebudayaan Tionghoa, Galangan VOC

Galangan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) berdiri pada tahun 1628 yang merupakan tempat dagang VOC. Namun pada tahun 1980 – 1990 gedung yang memiliki luas 2000 meter persegi ini digunakan sebagai gudang gula, bengkel besi dan kayu, gudang bahan kimia. Pada tahun 1997, PT. Sunda Kelapa Lestari (Ibu Susilawati) membuat gudang ini sebagai pusat kebudayaan Tionghoa. Gedung ini terletak di Jalan Kakap No.1 Penjaringan, Jakarta Utara.

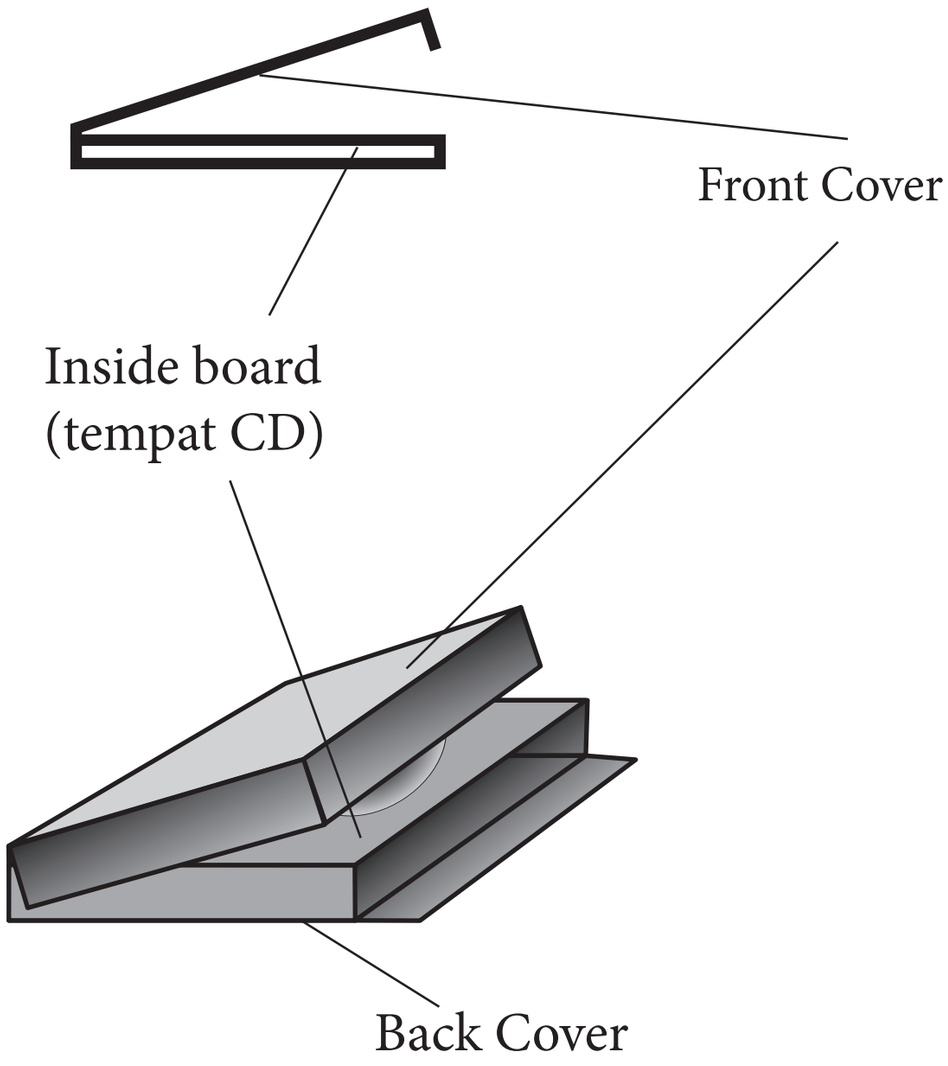

Inside board



NAPAK REFORMASI TRAGEDI MEI 1998 di JAKARTA

NAPAK REFORMASI TRAGEDI MEI 1998 di JAKARTA

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

manibacarakebencian

Back Cover

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta 10310
Tel. +62 21 3903963, Fax. +62 21 3903922
mail@komnasperempuan.or.id
http://www.komnasperempuan.or.id